

## DISEMINASI DAKWAH ERA DISRUPSI 4.0 DAN LITERASI MEDIA SOSIAL (PERSPEKTIF JURNALISME PROFETIK)

Firdaus Muhammad  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
Email : daus\_afkar@yahoo.co.id

### Abstract

*The flow of information through social media (social media) also influences people's behaviour. The rise of various news in social media which leads to religious propaganda is increasingly difficult to stem. Propaganda in communication or media studies does not always have a negative connotation. But in this discussion, propaganda is more directed at the provocation dimension, precisely the issue of religion becomes propaganda or politicized by elites and hoaxes spreaders to provoke the people with massive information distribution.*

Keywords: *prophetic journalism; hoax; media propaganda.*

### A. PENDAHULUAN

Komunikasi lisan yang diunggah di media sosial menjadi tren masyarakat, perbincangan yang kadang personal dipublikasi tanpa memikirkan resiko jejak digital, nyatanya banyak produk komunikasi lisan itu diunggah hingga viral sekalipun isinya sekadar lelucon. Karena viral, selain populer juga mendulang uang. Ariel Haryanto dalam buku, *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya di Layar Indoensia*, (terbit 2018) mengungkap kehidupan yang berkiblat pada komunikasi lisan. Masyarakat lebih peka bahkan cepat mengakses informasi berupa gambar atau video ketimbang mesin pengelola kata.

Belakangan juga berkembang *citizen journalism* atau jurnalisme warga, tetapi beritanya tetap disaring media, kecenderungan jurnalisme warga berganti pemberitaan warga atau perorangan makin massif di medsos, mereka bebas memberitakan atau publikasi aktifitas yang ditonton publik dengan berjejaring dalam jaringan media sosial semisal facebook, twiter, instagram, whatsapp, dan berbagai aplikasi lain yang menghubungkan masyarakat sehingga dunia terlipat, tanpa jarak.

### Wajah Agama di Media Sosial

Propaganda agama dalam konteks ini diartikan proses agama jadi komoditas propogandis yang penuh dengan kebencian, tafsir sesat atas sebuah kebohongan sehingga wajah agama menjadi buram, sesak dengan fitnah dan adu domba berujung konflik. Sejatinya agama menjadi suci dan menebarkan kedamaian. Tetapi di media sosial yang sarat *hoax*,

wajah agama dilumuri informasi yang anomali dari nilai-nilai kedamaian dan kebenaran agama. Apalagi jika bersentuhan isu politik praktis, agama kadang jadi alat propaganda belaka. Wajah agama di medos tampak demikian buruk sehingga diniscayakan ada proses edukasi secara berkesinambungan.

Massifnya sebaran informasi *hoax* atau berita bohong di media sosial berdampak pada aspek kehidupan keagamaan, bahkan makin subur dengan menjadikan isu agama sebagai isu propagandis di medsos, apalagi dikaitkan dengan kepentingan politik jangka pendek yang lebih pragmatis dan fargmentatif. Sesaat setelah pencabutan nomor capres-cawapres 2019/2018 sontak media sosial disesaki konten kampanye sekaligus memunculkan *meme* menghardik lawan politiknya.

Akibatnya wajah agama di media sosial makin buram dengan kegaduhan informasi yang sulit dibedakan antara kebenaran dan kebohongan. Wajah agama *rahmatan lil alamin* berubah dengan wajah kebencian, saling menyudutkan, saling menyalahkan dengan klaim dirinya paling benar. Fatalnya, ujaran kebencian dan provokasi itu disebar secara massif di media sosial dan nyatanya banyak yang masih percaya. Seakan lahirnya keyakinan akan kebenaran dari sebuah kebohongan.

## B. TINJAUAN TEORITIS

### Perspektif Jurnalisme Kenabian

Isu propaganda dan provokasi atas nama agama di media sosial, maka perlu dilihat dalam pandangan jurnalisme kenabian (*prophetic journalism*). Pekerjaan jurnalis atau wartawan, pembawa berita sangat mulia dan terhormat. Bahkan merujuk pada istilah *An-Naba* yang berarti berita dan *Nabi* berarti pembawa berita. Maka membawa berita kebenaran untuk kemaslahatan umat dengan informasi atau berita yang benar merupakan pekerjaan nabi.

Sementara itu, keteladanan dari sifat kenabian Rasulullah Saw meliputi; *amanah*, *siddiq*, *fathanah* dan *tabligh*, niscaya menjadi keharusan bagi wartawan atau jurnalis untuk memilikinya dalam menjalankan profesi sebagai jurnalis, pembawa berita. Nilai-nilai kenabian yang dibangun dari sifat-sifat nabi itu, maka seorang jurnalis perlu amanah. Yakni, memiliki rasa tanggung jawab terhadap semua berita yang diberitakan melalui medianya. Demikian juga, sifat as-sidiq. Seorang jurnalis harus terpercaya sehingga tidak ada

kebohongan dalam pemberitaannya, semua informasi dari peristiwa yang diliputnya mengandung kebenaran sehingga beritanya terpercaya.

Seorang jurnalis juga harus memiliki *feeling* atau kepekaan dalam peliputan berita secara cerdas atau *fathonah*. Kecerdasan menjadi modal bagi seorang jurnalis untuk memproduksi berita lebih berkualitas. Kecerdasan yang diwarisi dari nabi yang memiliki kecerdasan yang didedikasikan untuk kebaikan masyarakat atau umat. Kemudian *tabligh* yakni informasi harus disampaikan ke publik karena hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan sehat.

Parni Hadi menawarkan *Jurnalisme Profetik*, sebagai tren dalam kajian media untuk mencermati profesi jurnalis yang mengemban amanah mewarisi sifat kenabian. Bagian awal buku yang ditulis tahun 2014 itu mengingatkan betapa mulianya jurnalis sebagai pekerjaan nabi, nabi itu pembawa berita, berita langit yang kemudian disebarakan pada umatnya.

#### **Dakwah Digital 4.0**

Era revolusi industri 4.0 menjadi penanda arus globalisasi tidak terbendung disertai kecanggihan teknologi. Era ini menjadi angin segar pengembangan dakwah Islam berbasis digital. Sejumlah ulama, penceramah dan tokoh agama memanfaatkannya. Prof. Quraish Shihab dan KH. Mustafa Bisri (Gus Mus) dengan mudah kita kases ceramahnya. Demikian juga Ustas Abdul Shomad (UAS) melejit, juga Nissa Sabyan viral dan diakses jutaan pengunjung di *youtube*.

Kini memasuki era dakwah 4.0. Perkembangan teknologi turut mempengaruhi perilaku manusia. Perkembangan alat komunikasi diantaranya cukup inovatif. Saat bersamaan sekumpulan orang dapat duduk bersama-sama, tetapi masing-masing sibuk dengan *handphone* (HP) mereka. Lebih dahsyat lagi, adanya media sosial kian menjebak setiap pemiliknya asyik masyuk dengan HP dalam genggamannya. Hal ini menjadi fenomena masyarakat yang lahir sebagai generasi melek teknologi, masyarakat generasi milenial.

Perbincangannya ringan dan tanpa kontrol *gatekeeper*, cukup pertimbangan perasaan dan jaga *image* semata. Setiap orang dapat berbicara apapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Lebih dari itu, perbincangan yang sifatnya *privacy* kadang kadang jebol masuk ke ranah publik.

Sekiranya lahir kesadaran kolektif untuk memaksimalkan konten pembicaraan lebih bermuara pada *amar maruf nahi mungkar*, berdakwah. Persoalan kecil dapat diurai sistematis

tanpa kehilangan substansi, sekalipun berbicara dalam laman yang cukup terbatas. Bayangkan, jika seseorang membuat status atau pesan di *Facebook*, atau WA dengan nuansa keagamaan. Maka setiap pembaca yang mengikuti laman itu membaca pesan-pesan keagamaan tersebut hingga viral.

Inovasi dakwah melalui media sosial tak terhindarkan. Sesekali saya menyaksikan jamaah tarwih memanfaatkan waktunya di masjid untuk menunggu waktu shalat untuk bertadarus. Sementara ia tidak membawa al-Qur'an melainkan diakses dari HP mereka. Perilaku keagamaan pun bergeser. "Sampaikanlah walau satu ayat". Tidak terkecuali menulis pesan keagamaan melalui status di FB, IG, Line dan WA sebagai ikhtiar *amar maruf nahi munkar*. Kini jejak digital para ulama dapat diakses secara cepat, anugerah era dakwah 4.0

### C. PEMBAHASAN

Penelitian ihwal jurnalisme profetik merupakan bagian diseminasi keilmuan melalui mata kuliah ini juga akan menjadi salah satu kesempatan bagi mahasiswa untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan yang lebih luas lagi dengan profesi jurnalistik.

Proses Interdisipliner jurnalistik profetik (ilmu Dakwah dan ilmu Komunikasi) menjadi bagian komitmen pengembangan keilmuan dan praksis. Dalam hal ini, jurnalistik profetik dipandang sebagai salah satu bagian dari bentuk kegiatan dakwah, juga dilihat sebagai kegiatan komunikasi. Dari sisi ini kemudian timbul dua suku kata yang mendasar, yaitu dakwah dan komunikasi. Secara etimologi, dakwah yang berasal dari bahasa Arab; *da'a, yad'u, da'wan, du'a*, yang berarti upaya untuk mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan.<sup>1</sup>

Dakwah dalam pengertian terminologi, mengandung ragam pengertian. Pakar di bidang ilmu dakwah, laiknya pakar ilmu komunikasi, yang memberi tafsiran yang beragam tentang apa yang dimaksud dakwah dalam segi operasional kegiatannya. Dalam pada itu, Enjang dan Aliyuddin berpendapat; "perbedaan yang terdapat pada setiap penjelasan para

---

<sup>1</sup>*Majma' al-lughah al-'Arabiyyah* (1972: 286). Aspek-aspek dakwah mencakup aktifitas komunikasi, yaitu; mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Pengertian dakwah menurut Moh Natsir, "... dakwah adalah tugas para muballigh untuk meneruskan risalah yang diterima dari Rasulullah SAW. Sedangkan risalah adalah tugas yang dipikulkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan wahyu Allah yang diterimanya kepada umat manusia. Selanjutnya beliau mengatakan "Risalah merintis, sedangkan dakwah melanjutkan". RB. Khatib Pahlawan Kayyo., *op. cit.*, h. 25-26. Lihat juga, Enjang AS, dan Aliyuddin., *op. cit.*, h. 3-14.

pakar dan cendikia itu, kelihatannya lebih pada aspek orientasi dan penekanan bentuk kegiatannya, bukan pada aspek esensinya”.<sup>2</sup>

Berdasarkan pendekatan ilmiah dan historis, terminologi dakwah yang diketengahkan dalam uraian ini, adalah pendapat Syekh Ali Mahfud dan Sayyid Qutb yang memberi penegasan tentang hakikat (*ontologi*) dakwah. Lebih lanjut, Syekh Ali Mahfud, berpendapat bahwa dakwah; Sebagai upaya membangkitkan kesadaran manusia di atas kebaikan dan bimbingan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar supaya mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>3</sup>

Dibandingkan dengan pengertian dakwah yang diterangkan Syekh Ali Mahfud di atas, oleh Sayyid Qutb menjelaskan pengertian dakwah secara universal, dengan penegasan kalimat “... dakwah adalah mengajak atau mendorong orang untuk masuk ke dalam *sabilillah*, bukan untuk mengikuti da'i atau bukan pula untuk mengikuti sekelompok orang”.<sup>4</sup> Kendatipun tidak secara eksplisit, pengertian kedua lebih cenderung menekankan suatu proses dakwah (*tabligh*) atau dalam pandangan sentral disebut proses komunikasi.

Onong Uchjana memberi pengertian sederhana komunikasi massa, yaitu “...komunikasi melalui media massa modern”.<sup>5</sup> Sementara Jalaluddin Rakhmat mengemukakan komunikasi massa, yaitu; ... jenis komunikasi yang ditujukan kepada semua khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.<sup>6</sup>

Apabila defenisi di atas dijadikan sandaran, maka jurnalistik profetik juga mencakup dimensi komunikasi massa. Lazimnya dalam teori komunikasi massa, misalnya unsur-unsur komunikasi gagasan Harold D. Lasswell, kemudian dikonseptualisasi menjadi; (*who*) jurnalis Muslim, (*says what*) *amar makruf nahyi munkar*, (*in wich channel*) pers Islam, (*to whom*)

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 5. Uraian lengkap tentang ragam defenisi dakwah menurut pakar Ilmu Dakwah (Syukriadi, Jalaluddin Rahmat, Toha Yahya Umar, Hamzah Yakub, Ahmad Subandi, dan sebagainya) di lihat pada uraian Enjang dan Aliyuddin., *ibid*, h. 24-25.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 6. Dalam penelusuran litaretur, oleh Enjang dan Aliyuddin menerangkan bahwa cikal bakal lahirnya ilmu Dakwah untuk kali pertama dirintis di Universitas Al-Azhar (Mesir, tanpa penyebutan Tahun) oleh akademisi; Syekh Ali Mahfudz, yang menulis sebuah buku berjudul *Hidayat al-Mursyidin*. Kemudian pada tahun 1960-an, Ahmad Ghalwusy menulis buku dengan judul *Al-Da'wah al-Islamiyah*, dengan asumsinya bahwa dakwah Islamiyah merupakan disiplin yang mandiri dan sebagai bagian dari bidang ilmu Islam. Uraian lengkap lihat, *ibid.*, h. 16.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 6. Pendapat Sayyid Qutb ini didukung oleh defenisi yang diungkapkan Masdar F. Mashudi yang (dikutip Enjang dan Aliyuddin) mengartikan dakwah Islamiyah ialah sebagai suatu proses penyadaran untuk mendorong manusia agar tumbuh danberkembang sesuai dengan fitrahnya.

<sup>5</sup>Media massa yang dimaksud beliau adalah surat kabar, film, radio, dan televisi. Onong Uchjana Effendy., *op. cit.* h. 50. (Buku ke-1)

<sup>6</sup>Ahmad Y. Samantho., *op. cit.*, h. 52-53.

khalayak, (*with what effect*) kultur Islam.<sup>7</sup> Ikhtisar pengertian jurnalistik profetik, adalah dakwah oleh jurnalis muslim, baik melalui tulisan maupun lisan, menggunakan sarana komunikasi massa (cetak maupun elektronik), bertujuan menyampaikan informasi atau berita kepada khalayak (komunikasikan). Signifikansi jurnalistik profetik sebagai aspek komunikasi yang bertujuan, dijelaskan dalam Firman Allah SWT, Q.S Ali ‘Imran /03: 104.

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”<sup>8</sup>

Secara garis besarnya, tujuan dakwah termaktum pada ayat di atas, yaitu; menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar. Inilah yang dimaksud Onong Uchjana dengan fungsi komunikasi, tidak sekedar *how communication works (dassein)* tetapi *how communication (dassollen dan daswollen)* agar terjadi perubahan sikap (*attitude*), pandangan (*opinion*) perilaku (*behavior*) kepada individu (mikro) kelompok (meso) dan masyarakat (makro) sesuai kandungan ayat tersebut di atas.<sup>9</sup>

Dengan demikian, jurnalistik profetik tujuannya tidak lain adalah dakwah “*amar makruf nahyi munkar*” sebagaimana inti dari ajaran Islam. Tujuan dakwah dalam hal ini dikonseptualisasikan dalam etika jurnalistik, berdasar pada Al Qur’an dan Sunnah. Jalaluddin Rakhmat dalam Nikmah Hadiati, menjelaskan konsep tentang etika jurnalistik yang tergambar dalam Al-Qur’an. Misalnya, *Qaulan sadida* (QS. An-Nisa ayat 9, Al-Ahzab ayat 70) yang digambarkan dalam bentuk ucapan-ucapan yang lemah lembut (halus), jelas, jujur, tepat, baik, dan adil. *Qaulan ma’rufa* (QS An-Nisa ayat 5 dan 8, QS Al-Baqarah ayat 235, QS Al-Anfal ayat 32). Secara bahasa arti *ma’rufa* adalah baik dan diterima oleh nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Ucapan yang baik adalah ucapan yang diterima sebagai sesuatu yang baik dalam pandangan masyarakat lingkungan penutur. *Qaulan baligha* (QS An-Nisa ayat 63) diartikan sebagai pembicaraan yang fasih atau tepat, jelas maknanya, terang, serta tepat mengungkapkan apa yang dikehendakinya atau juga dapat diartikan sebagai ucapan yang

<sup>7</sup>Wiryanto., *op. cit*, h. 70.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI., *op. cit*, h. 93.

<sup>9</sup>Onong Uchjana Effendy., *op. cit*, h. 35. (Buku ke-1)

benar dari segi kata. Dan apabila dilihat dari segi sasaran atau ranah yang disentuhnya dapat diartikan sebagai ucapan yang efektif.<sup>10</sup>

Demikian halnya Suf Kasman, Ahmad Y. Samantho, kemudian oleh Muhammad Ibrahim Nashr, memiliki gagasan serupa tentang etik-normatif jurnalistik melalui kajian mendalam tentang kandungan Al-Quran dan Sunnah.<sup>11</sup> Sejalan dengan itu, defenisi jurnalistik profetik dilihat sebagai acuan dasar bagaimana formulasinya, melalui konteks apa, bagaimana, dan nilai seperti apa yang melandasi pandangan jurnalistik profetik.

Namun pada kenyataannya, jurnalistik profetik kerap diperdebatkan (pro-kontra), lebih jauh belum mendapatkan pengakuan (*legitimate*) secara universal oleh para ilmuwan. Oleh karena itu (*dassein*), aspek-aspek dasar jurnalistik profetik paling tidak berfaedah sebagai spektrum wawasan pengetahuan sekaligus menjadi telaah perbandingan di antara varian paradigma jurnalistik yang telah berkembang dewasa ini. Jurnalistik profetik dalam konteks bahasan ini hendak dikaji bagaimana bentuknya apabila berada dalam pendidikan jurnalistik berbasis perguruan tinggi Islam.

*The journalist behind the pen*, adalah entitas jurnalis sebagai pengendali pesan jurnalistik. Jurnalis profesional meniscayakan berita berkualitas, demikian sebaliknya suatu berita merepresentasi kualitas jurnalisnya. Diversitas pengertian jurnalis profesional, namun kualifikasi jurnalis menurut Dewan Pers adalah kompetensinya. Aspek-aspek kompetensi itu terbagi atas; kesadaran (*awareness*) pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*). Untuk memenuhi kompetensi jurnalis, alternatifnya melalui pendidikan jurnalistik, pelatihan jurnalistik, dan sistem pengembangan karir.<sup>12</sup>

Kemajuan negara maju di sektor pendidikan setidaknya menginspirasi negara-negara berkembang, terutama di Indonesia dengan aksesibilitas pendidikan jurnalistik berbasis perguruan tinggi.<sup>13</sup> Diskursus tentang pendidikan jurnalistik di perguruan tinggi mendapat

---

<sup>10</sup>Disadur oleh Nikmah Hadiati dari Makalah Seminar Jalaluddin Rakhmat, *Etika Komunikasi Perspektif Religi*, (Jakarta, perpustakaan nasional, 1996). Nikmah Hadiati menyimpulkan, inti dari segala standar dakwah dalam jurnalistik, tidak lain untuk menebarkan kebenaran. Prinsip yang mendasari kebenaran ialah jelas, jujur, tepat, baik, dan adil dalam menyampaikan informasi. Oleh sebab itu, jurnalis muslim dalam kinerjanya mengemban suatu amanah yang mulia, diibaratkan peran Rasulullah SAW yang menebarkan kebenaran melalui dakwah Islamiyah kepada seluruh umat. Nikmah Hadiati., *Islam dan Jurnalistik*. (Surabaya; Fakultas Dakwah IAIN Sunan, Jurnal Ilmu Dakwah, 15, No. 2 Oktober, 2007), h. 282-283.

<sup>11</sup>Sumber rujukan (literatur); Suf Kasman., *Dakwah bi Al-Qalam Perspektif Al-Qur'an*, h. 77-105. Ahmad Y. Samantho., *Peran Jurnalistik-Pers Islami*, *op. cit*, h. 66-77. dan Muhammad Ibrahim Nashr., *Ciri-Ciri Khas Informasi Islam*, *op. cit*, h. 29-55.

<sup>12</sup>Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan Persatuan Wartawan Indonesia., *Wajah Pers Indonesia*, (Jakarta; Bunga Bangsa, 2006), h. 63-65.

<sup>13</sup>Perguruan tinggi yang dimaksud menyelenggarakan program studi jurnalistik atau publisistik-komunikasi, diantaranya; Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas

respon yang beragam dari kalangan akademisi, praktisi media, organisasi profesi wartawan, dan pihak pemerhati pers Indonesia.<sup>14</sup>

Konteks diskursus tersebut erat berkaitan dengan eksistensi lembaga pers Indonesia (penerbitan dan penyiaran) yang meningkat secara kuantitas, sementara kecenderungan tersedianya tenaga profesional di bidang jurnalistik kian menurun, kesenjangan *supply* dan *demand* menurut Zulkarnaen Nasution.<sup>15</sup> Inilah tantangan perguruan tinggi, menjawab kesenjangan antara peningkatan (kuantitas) lembaga pers di Indonesia, dengan ketersediaan sumber daya manusia profesional di bidang jurnalistik. Meminjam analisa Mahtum Mastoem, “jumlah penerbitan pers di Indonesia sekira mencapai angka 1.381 buah, sementara populasi penduduk hanya berkisar 220 juta jiwa”.<sup>16</sup> Belum terhitung berapa jumlah lembaga penyiaran, (stasiun televisi dan radio) berskala regional, nasional, yang terus bertumbuh di wilayah Indonesia dasawarsa ini.

Suatu fakta yang mengandung varian konsekuensi. Dalam kondisi semakin meningkatnya jumlah lembaga pers, masing-masing berusaha semaksimal mungkin untuk meraih pangsa pasar seluas-luasnya. Dalam persaingan komoditas informasi, signifikan memengaruhi kebijakan (*policy*) pemilik saham pers, membuka peluang kerja seluas-luasnya kepada siapa saja mendadak jadi jurnalis, dan atau siapapun bisa menjadi jurnalis—dengan atau tidak memiliki bakat dan substansi ilmu jurnalistik.

Idealnya rekrutmen jurnalis membutuhkan proses yang selektif dan simultan. Ukuran selektif dalam pengertian memenuhi kualifikasi dasar profesi jurnalis. Sebagai yang dirumuskan Dewan Pers, bahwa kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan, adalah kualifikasi dasar profesi jurnalis. Karena itu, keniscayaan pendidikan dan pelatihan praktis jurnalistik sebagai sarana peningkatan mutu jurnalis. Jelas menurut Zulkarnaen Nasution “... kinerja profesionalisme jurnalis tidak dapat dipisahkan dari pendidikan yang menghasilkan

---

Padjajaran (UNPAD) Bandung, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Fajar (UNIFA) Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan lembaga-lembaga pendidikan negeri dan swasta lainnya, yang menyebar di wilayah Indonesia. Sebuah studi pendahuluan yang ditelusuri dari berbagai referensi, wawancara, dan tinjauan langsung ke lokasi setempat (UNHAS, UNIFA). Juli 2009 hingga Desember 2010.

<sup>14</sup>Konferensi dan Lokakarya Nasional Pendidikan Jurnalisme di Indonesia (digelar di Yogyakarta, 15 April 2007) menghasilkan berbagai hal penting. Tindaklanjut dari hasil tersebut adalah memperbaiki mutu lulusan jurusan jurnalistik di berbagai lembaga pendidikan. Etika; Berita Dewan Pers., *Konferensi dan Lokakarya Nasional Pendidikan Jurnalisme: Tantangan dan kompetensi*, no. 48, April 2007, h. 1-2.

<sup>15</sup>Zulkarimein Nasution., *Jurnalis Handal, Butuh Kurikulum Standar*, (Staf Pengajar Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia). Etika; Berita Dewan Pers., *Ibid*, h. 2.

<sup>16</sup>Dikaitkan dengan rasio penerbitan per-orang, standar UNESCO, satu eksamplar untuk 10 penduduk, masyarakat Indonesia “miskin minat baca” ujar Mahtum Mastoem dalam artikel; *Peta Bisnis Pers Indonesia dari Reformasi Sampai Konglomerasi*. Departemen KOMINFO RI, dan PWI., *op. cit*, h. 164.

sumberdaya manusia untuk bidang profesi ini.”<sup>17</sup> Atau sekurang-kurangnya seperti dikatakan Alex Sobur “... orang-orang yang mempunyai bakat *plus* teori, akan mencapai prestasi yang lebih baik daripada orang yang hanya mengalami praktek”.<sup>18</sup>

Pendidikan dan pelatihan praktis jurnalistik meniscayakan peranan antar lembaga. Baik perguruan tinggi dalam pengelolaan pendidikan jurnalistik, lembaga pers (penerbitan dan penyiaran) dalam penyelenggaraan pelatihan jurnalistik (*inhouse training*), organisasi profesi wartawan, misal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam sistem pengembangan karir wartawannya. Meski tidak menutup kemungkinan lembaga-lembaga pers, organisasi profesi wartawan, dan lembaga lainnya,<sup>19</sup> seiring bersamaan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan praktis jurnalistik.

Keragaman model pendidikan jurnalistik dan pelatihan praktis jurnalistik, bukan suatu pemilah-milahan yang bersifat monopoli, atau mendiskreditkan potensi lembaga yang satu atas lainnya. Sebab pada dasarnya bertujuan sama memenuhi standar kompetensi jurnalis-wartawan. Dalam pada itu, ada korelasi positif yang bisa dilihat dari keragaman model pendidikan jurnalistik. Haidar Putra Daulay misalnya menjelaskan dalam konteks pemberdayaan lembaga pendidikan;

... tuntutan kualitas tidak memungkinkan peserta didik melakukan kegiatan pendidikan formal saja, tetapi mesti serentak dan bersamaan dengan perlunya kebersamaan antara pendidikan formal, nonformal, dan informal. Karenanya memberdayakan semua lembaga pendidikan serta mengaturnya menjadi satu kesatuan adalah suatu upaya untuk lebih memberdayakan pendidikan di era globalisasi.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Etika; Berita Dewan Pers., *loc. cit*, h. 2-3. Bandingkan dengan ungkapan Schoorl dalam Sudarwan dan Moh. Padil, “... praktik-praktik pendidikan merupakan wahana terbaik dalam menyiapkan SDM dengan derajat moralitas tinggi”. Moh. Padil., *Sosisologi Pendidikan*, (Yogyakarta; UIN-Maliki Press, 2007), h. 42.

<sup>18</sup>Alex Sobur., *Etika Pers; Profesionalisme dengan nurani*, (Bandung; Humaniora Utama Press, 2001), h. 131. Bandingkan dengan, GBHN hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1993 (Tap MPR RI No. II/MPR/1993) tentang penerangan, komunikasi, dan media massa, pada butir g, ditegaskan bahwa “peningkatan pers dan media massa dalam pembangunan perlu terus didukung oleh peningkatan kualitas tenaga terdidik dan profesional ... Lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pers dan media massa perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan”. Alex Sobur, *Ibid.* h. 105.

<sup>19</sup>Leo Batubara (mantan anggota Dewan Pers) mengatakan, ... banyak potensi pendidikan jurnalistik di Indonesia. Khususnya pada lembaga-lembaga pendidikan jurnalistik, misalnya; Lembaga Pers Dr Sutomo (LPDS) Jakarta; Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y). Disadur dari artikel, Wisnu Dewabrata., Sumber; <http://webcache.googleusercontent.com/membangun-sekolah-jurnalisme-di-indonesia>. (akses 10 November 2010).

<sup>20</sup>Haidar Putra Daulay., *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta; Prenada Media, 2004), h. 211.

Artikulasi dari argumen tersebut di atas hendak menjalin sinergitas antar lembaga pendidikan, terutama lembaga yang mengakomodasi pendidikan dan pelatihan praktis jurnalistik.<sup>21</sup> Namun pada kenyataan, pendidikan jurnalistik berbasis perguruan tinggi, yang diklaim pihak akademisi (untuk tidak mengatakan seluruhnya) sebagai pemasok jurnalis andal-profesional, kompetitif, meragukan beberapa pihak. Bertolak dari pernyataan Nurudin, "... media di Indonesia dengan perkembangannya tidak bisa diimbangi dengan pendidikan formal jurnalistik".<sup>22</sup>

Kritik tajam yang logis, sebab sarjana jurnalistik pada umumnya dari lulusan perguruan tinggi, yang riil dilapangan relatif minim dibanding jumlah penerbitan dan penyiaran pers. "Lulusan ... yang ada baru siap latih, belum siap pakai" ujar Nurudin dalam karya tulisnya.<sup>23</sup> Ketidakmampuan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan jurnalistik yang handal berimbas pada terbentuknya pilihan untuk memberdayakan calon jurnalis dengan cara alamiah (natural) *unscientific*.

Pada umumnya calon ataupun yang telah resmi sebagai jurnalis, melalui pendidikan dasar, misalnya pelatihan praktis jurnalistik, atau sistem pengembangan karir mediasi Persatuan Wartawan Indonesia. Terlepas dari penting atau tidaknya jurnalis melalui proses pendidikan, persoalannya mengapa sarjana jurnalistik senjang dengan dunia kerjanya, bagaimana eksistensi perguruan tinggi sebagai pencetak generasi intelektual yang andal dan produktif menjawab persoalan itu. Sejalan dengan uraian Dewan Pers;

Kekurangan pasokan jurnalis profesional untuk industri pers ini salah satunya disebabkan belum mampunya perguruan tinggi menghasilkan tenaga siap kerja di bidang pers. Karena itu, ada pergeseran orientasi yang sudah berlangsung cukup lama di kalangan perusahaan media, bahwa kebutuhan terhadap jurnalis tidak lagi harus berasal dari lulusan disiplin ilmu jurnalistik.<sup>24</sup>

Mengurai kendala internal dan eksternal perguruan tinggi dalam hal pendidikan jurnalistik merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa dari sekian banyak (untuk tidak menyebut seluruhnya) lulusan sarjana jurnalistik maupun ilmu komunikasi kurang

---

<sup>21</sup>Bentuk sinergitas tersebut diwujudkan menjadi Asosiasi Pendidikan Jurnalisme Indonesia (APJI), atas prakarsa Program S-1 Reguler Ilmu Komunikasi FISIP-UI, bekerjasama dengan Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat, dan difasilitasi oleh Dewan Pers dan Unesco (Yogyakarta, 15 April 2007). Etika; Berita Dewan Pers., *loc. cit.* h. 1-2.

<sup>22</sup>Nurudin., *Jurnalisme Masa Kini*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2009), h. 143.

<sup>23</sup>*Ibid*, h.145.

<sup>24</sup>Etika; Berita Dewan Pers., *loc. cit*, h. 1-2.

diberdayakan oleh lembaga penerbitan dan penyiaran pers. Hasil penelitian Thomas Hanitzsch menyatakan; ... kurikulum nasional menghambat penyelenggaraan pendidikan jurnalistik, tidak ada interaksi antara pendidikan jurnalistik dan industri media, dan tidak dilengkapi sarana teknologi atau laboratorium yang kurang memadai.<sup>25</sup>

Suatu analisa objektif dan komprehensif, namun bagaimanapun hasil penelitian itu bersifat temporer, dan masih perlu dikaji sesuai perkembangan pendidikan jurnalistik dasawarsa ini, dengan mencermati upaya-upaya perguruan tinggi dalam pengembangan mutu pendidikan.

Banyak aspek meliputi pengembangan pendidikan jurnalistik perguruan tinggi. Namun secara inklusif, dikaitkan dengan rumusan dewan pers serta diskursus tentang kompetensi wartawan Indonesia, maka sasaran pengembangan pendidikan jurnalistik yang dituju adalah kurikulum.<sup>26</sup> Sejalan dengan hal itu, Rulli Nasrullah mengemukakan;

... kurikulum pendidikan jurnalistik disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan yang nantinya diturunkan dalam standar kompetensi dan standar Isi. Yang riil dari standar itu dalam bentuk kurikulum adalah apa yang disampaikan pengampu di dalam kelas yang disebut dengan kurikulum terimplementasi ... berupa teori maupun praktek.<sup>27</sup>

Kurikulum pendidikan jurnalistik pada perguruan tinggi, yaitu, multi-disiplin keilmuan dan terapan jurnalistik, yang ditunjang dengan sarana dan prasarana mutakhir teknologi informasi-media massa. Misalnya, perangkat stasiun radio, televisi, laboratorium foto atau sinematografi, pers mahasiswa dan wadah empiris jurnalistik sebagai miniatur lembaga pers.<sup>28</sup> Keterandalan pendidikan jurnalistik di perguruan tinggi pada umumnya tidak lepas dari faktor SDM. Dalam hal ini tenaga pengajar atau dosen pengampu berkualifikasi pendidikan jurnalistik, atau publisistik dan komunikasi (pendahulunya), notabene mereka mendalami secara komprehensif keilmuan jurnalistik.

---

<sup>25</sup>Thomas Hanitzsch dalam penelitian "*Rethinking Journalism Education in Indonesia; Nine Theses*". Dari Universitas Ilmenau-Jerman, kandidat Doktor Universitas Gadjah Mada, dan pernah meneliti tentang pendidikan jurnalistik di Indonesia (Harsono; 2004), Nurudin., *op. cit.*, h. 146-149.

<sup>26</sup>Moh. Padli dan Triyo Supriyanto mengemukakan, ... pengembangan kurikulum pendidikan sesungguhnya berkisar pada permasalahan penanaman identitas sosial dan pengembangan integritas pribadi. Relevansi sosial dari apa yang diajarkan merupakan masalah penting yang tidak dapat diabaikan dalam penyusunan pengembangan kurikulum. Uraian selengkapnya lihat, Moh. Padli., *op. cit.*, h. 187.

<sup>27</sup>Disadur dari karya tulis, Rulli Nasrullah., *Kurikulum Pendidikan Jurnalistik*, (Dosen Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), sumber; <http://www.scribd.com/doc/8157720/Kurikulum-Pendidikan-Jurnalistik>. (akses 20 Oktober 2010).

<sup>28</sup>Pers mahasiswa, misalnya di UNHAS; *Identitas* (surat kabar), di UIN Alauddin; *Washilah* (tabloid dan stasiun radio), *Sy'ar* (stasiun radio), yang menjadi wadah-praktikum mahasiswa di bidang jurnalistik. Sebuah studi pendahuluan yang ditelusuri dari berbagai referensi, wawancara, dan tinjauan langsung ke lokasi setempat. Juli 2009 hingga Desember 2010.

Pada sisi lain, perguruan tinggi melibatkan sumber daya manusia atau pengajar dari kalangan praktisi media (wartawan senior) bermodal pengalaman praktis yang memadai, merupakan bentuk sinergitas perguruan tinggi dengan lembaga atau organisasi pers. Dengan melihat aspek-aspek terkait pengembangan pendidikan jurnalistik pada perguruan tinggi, adalah keniscayaan jawaban atas asumsi-asumsi yang meragukan potensi pendidikan jurnalistik perguruan tinggi.

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin sebagai pusat studi Islam, responsif dengan perubahan–pengembangan pendidikan yang sesuai tuntutan zaman dan masyarakatnya.<sup>29</sup> Wujud nyata pengembangan pendidikan tersebut dilihat dengan kehadiran fakultas dan jurusan-jurusan umum, antara lain Fakultas Sainstek, Ilmu Kesehatan, Ilmu Komunikasi, terutama Jurusan-Program Studi Jurnalistik, Penyiaran (*Islamic Broadcasting*), dan lain sebagainya. Kehadiran fakultas dan jurusan-jurusan umum, khususnya program studi Jurnalistik ini menjadi fokus bahasan yang akan dikaji lebih dalam. Bagaimana pendidikan jurnalistik itu apabila ia berada dalam basis perguruan tinggi Islam?

Berdasar studi pendahuluan, ada beberapa persoalan terkait keberadaan jurusan–program studi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pokok bahasannya adalah kontras perbedaan antara konsep ilmu jurnalistik yang dianggap selama ini adalah sebagai disiplin ilmu umum, dengan paradigma keilmuan Islam.<sup>30</sup> Pada dasarnya, secara kelembagaan Universitas Islam Negeri Alauddin memiliki karakter pendidikan yang berbeda dengan perguruan tinggi negeri pada umumnya.

Perbedaan karakter pendidikan dilihat dari visi dan misi sebagai arah haluan (orientasi) akademik. UIN Alauddin Makassar dengan visi dan misi yaitu; “integrasi ilmu agama (Islam) dan ilmu umum”,<sup>31</sup> merupakan konstruk ideologis sekaligus sebagai karakter

---

<sup>29</sup>Lihat sejarah (konversi) dari IAIN menuju UIN (*wider mandate*), serta perkembangannya dalam tiga model (Azyumadi Azra) yang terkait dengan isu-isu dikotomi kelembagaan dan keilmuan. *Tantangan Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi; Wacana Sekitar IAIN Sebagai Pusat Pengkajian Kebudayaan dan Peradaban Islam*, (Makassar; Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat IAIN Alauddin Makassar), h. 15-29. Bandingkan, Mulkan dalam Mustari mengemukakan; ... pusat studi Islam harus melakukan perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan zamannya, termasuk menghilangkan sakralisasi studi Islam dalam peta ilmu. Mustari Mustafa., *Liberalisasi Pendidikan; Dimana Fakultas Komunikasi Islam* (Jurnal Dakwah; Tabligh Media Pengkajian Dakwah dan Komunikasi Islam, 5, Desember 2003), h. 85.

<sup>30</sup>Teks literatur yang berkaitan dengan konsep integrasi ilmu (paradigma Islam) dapat dilihat pada karya tulis, Hasan langgulung., *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Jakarta; Pustaka Al Husna Baru, 2003), Abuddin Nata., *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum*, (Jakarta; UIN Press, 2005), Mulyadhi Kartanegara., *Integrasi Ilmu; Sebuah Konstruksi Holistik*, (Bandung; Mizan Pustaka, 2005), Arqam Kuswanjoyo., *Integrasi Ilmu dan Agama*, (Yogyakarta; Badan Penerbit Filsafat UGM, 2010).

<sup>31</sup>Visi UIN Alauddin Makassar adalah; menjadi pusat keunggulan akademik dan intelektual yang mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dan IPTEK, menjadi pusat pengembangan nilai-nilai akhlak mulia, kapasitas, potensi dan kepribadian muslim Indonesia yang lebih ber peradaban. Uraian data selengkapnya lihat, *Panduan Akademik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*. 2009, h. 6-7.

yang membedakan dengan pendidikan pada umumnya. Persoalannya, apabila visi dan misi integrasi keilmuan tersebut diejawantahkan dalam pendidikan jurnalistik, bagaimana formulasinya, dan bagaimana hal ini dipahami secara komprehensif, kemudian direalisasikan oleh mahasiswa jurnalistik sebagai calon jurnalis muslim.

Menjawab pertanyaan itu secara maksimal, maka perlu diadakan sebuah studi tentang pendidikan jurnalistik berbasis perguruan tinggi Islam, khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Alasan yang mendasar tentang pentingnya penelitian ini di angkat, tidak lain untuk menemukan gambaran tentang integrasi ilmu agama dan ilmu umum dalam pendidikan jurnalistik, serta prospek pengembangan pendidikan jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.<sup>32</sup>

Ikhtisar dari uraian di atas, teridentifikasi bahwa orientasi pendidikan jurnalistik hendak dibangun berkarakter Islami sesuai harapan (*das sein*) institusional Universitas Islam Negeri Alauddin.<sup>33</sup> Sebab itu, kontekstualisasi pendidikan jurnalistik yang berkarakter Islami perlu mendapatkan perhatian, agar tidak terjadi penafsiran yang keliru, atau bias-bias dalam realisasinya.

### **Melawan Hoax**

Maraknya pemberitaan di medsos menjadikan setiap berita sejatinya di-*tabayyun*, diklarifikasi ihwal kebenarannya, sebab di medsos itu berseliweran berita bercampur cerita yang belum diklarifikasi kebenarannya. Di tengah massif pemberitaan hoax atau berita bohong di medsos hasil rekayasa dari kelompok *fasiq* yang meniscayakan *tabayyun* tentu masyarakat harus diedukasi sehingga kelak dapat menyimak berita benar dengan bermedsos yang lebih sehat.

Karenanya, *hoax* harus dilawan. Namun kesulitannya, masyarakat belum bisa membedakan ciri berita yang benar dengan berita tidak benar. Asupan berita *hoax* yang kian massif mengharuskan proses edukasi publik melalui medsos dengan konten lebih dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, sejumlah identifikasi terhadap berita *hoax* itu,

---

<sup>32</sup>Wacana dikotomisasi ilmu, sejak sekian lama menjadi perhatian di kalangan ilmuan muslim, terutama sejak lembaga IAIN Alauddin dikonversi menjadi UIN Alauddin. Peralihan nama lembaga ini, hendak mempertautkan ilmu agama dan ilmu umum, ke dalam kurikulum pendidikan di seluruh fakultas, dan jurusan-jurusan baru, terutama jurusan jurnalistik Fakultas Dakwah dan komunikasi.

<sup>33</sup>Visi Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin; adalah sebagai pusat kajian dan praktek Jurnalistik menuju tercapainya jurnalis yang profesional, Islami, dan berakhlak mulia. Disadur dari Arsip Jurusan/Prodi Jurnalistik., *Proposal; Program Studi Jurnalistik; Usul Perpanjangan Izin Program Studi Jurnalistik*, (Makassar, FDK UIN Alauddin, 2009), h. 6-7.

misalnya judul atau tema yang diulas provokatif, konten berlebihan dan bermuara pada nada kebencian atau mendeskreditkan kelompok tertentu.

Upaya melawan hoax itu dengan memutus informasi bohong di tangan anda, tidak menyebarkan sebelum diyakini kebenarannya. Disamping perlunya perimbangan dakwah di media online. Kalau di medsos masih didominasi berita-berita kebohongan, maka perlu diimbangi dengan memassifkan atau memviralkan berita-berita yang teruji kebenarannya atau menyajikan konten keagamaan dengan misi syiar Islam atau dakwah melalui website yang beritanya dapat disebar di media sosial.

Tawaran solutif dengan mengajukan perspektif jurnalisme kenabian atau jurnalisme propetik, sejatinya informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dan konten berita adalah realitas atau peristiwa yang nyata. Seorang jurnalis selaku penyebar berita harus memiliki sifat amanah, siddigh, fathonah dan tabligh.

Bahasa jurnalisme kenabian berpijak dari bahasa al-qur'an diantaranya; *qaulan kariman, qaulan ma'rufan, qaulan balighan, qaulan maysura, qaulan layyinan, qaulan tsaqilan, qaulan sadidan, qaulan adziman hingga ahsanul qaulan*. Menurut Harjani Hefni, *Komunikasi Islam*, Jakarta, Kencana, 2015 bahasa dalam komunikasi Islam yang dapat diadopsi melalui penggunaan bahasa jurnalis yang jelas, tegas, memuat fakta dan terhindar dari opini akan mengedukasi atau mencerdaskan publik. Betapa masyarakat yang kini larut dalam eforia bermedsos yang mulai mengabaikan media *maenstream* menjadi ancaman sekaligus peluang selama dikelola secara positif.

Semangat bahkan eforia bermedsos dapat menjadi ancaman sekiranya asupan informasi provokatif dimaknai sebagai fakta atau kebenaran. Di sisi lain justru dimaknai peluang selama konten yang disajikan benar, lalu dikelola secara inovatif dengan mengandalkan kecepatan dan ketepatan. Bahkan masyarakat dididik untuk menyajikan bahasa yang lebih etis dengan niatan syiar atau berdakwah melalui status di medsos atau sebaran informasi yang mengandung *amar maruf nahi mungkar*.

#### D. KESIMPULAN

Sejauh ini, medsos sebagai ajang aktulisasi diri sehingga hampir seluruh aktifitas di-*share* tanpa peduli itu bermanfaat atau tidak. Maka kelak jika tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan medsos sebagai lahan amal, pastinya akan menyeleksi konten serta

publikasi foto atau gambar yang standar dan beretika, bersih dari unsur kebohongan atau *hoax*.

Tegasnya, upaya melawan *hoax* menjadi tanggung jawab bersama, terutama tokoh agama yang memiliki kharisma dan legitimasi umat, untuk tidak menjadi agent yang *share* informasi yang berkonten agama tetapi isinya *hoax* yang bermuara pada propaganda agama secara keliru.

MUI Makassar melalui Komisi Infokom, diharapkan mampu mengelola media yang menjawab tantangan melawan *hoax* dengan menyajikan berita keagamaan yang terverifikasi melalui website yang dikelola secara profesional yang menjadi media alternatif di tengah massifnya medsos yang penuh propaganda. Hal ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dalam bingkai jurnalisme kenabian agar agama tidak dijadikan alat propaganda secara negatif.

Sebab jika isu agama dan isu SARA dibiarkan jadi menu di medsos tanpa *tabayyun* dan pertimbangan dari media online yang bertanggung jawab, maka peluang terjadinya fragmentasi, perpecahan dan konflik makin terbuka, umat terbelah. Sebaliknya, jika mampu mengelola media yang sehat dan mencerdaskan dengan beritanya bertanggung jawab, maka masyarakat akan tercerahkan. Bahkan obsesinya, masyarakat akan memiliki kesadaran tinggi untuk selektif dalam melahirkan dan *share* informasi yang tidak mendidik dengan membendung propaganda negatif atas nama agama diperkuat dari cara pikir yang berpijak pada jurnalisme kenabian. Semoga !

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Shahab, *Cara Mudah Menjadi Jurnalis*, Jakarta, Diwan, 2008  
Ariel Heryanto, *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya di Layar Indonesia*, Jkt, KPG, 2018  
Firdaus Muhammad, *Jurnalisme Profetik*, Buku Daras, UIN Alauddin Pres, 2013  
Harjani Hefni, *Komunikasi Islam*, Jakarta, Kencana, 2015  
Parni Hadi, *Jurnalisme Profetik*, Jakarta: Republika, 2014